

# **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO PADA MASA KEPEMIMPINAN BUPATI HASTO WARDOYO**

Lisa Oktaviani  
Lisa.oktaviani67@gmail.com  
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

## **Abstrak**

Dengan adanya Undang-undang nomor 18 tahun 2012 bahwa bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2007 menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Tujuan penelitian ini menganalisis faktor keberhasilan kebijakan ketahanan pangan kabupaten kulon progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo dan faktor apa yang paling berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo sangat baik yang di pengaruhi beberapa faktor yaitu komunikasi yang baik, strategi kebijakan dan program yang pro rakyat, komitmen dari pemerintah, dukungan dari masyarakat dan faktor yang mepengaruhi yaitu Komunikasi. Namun masih ada beberapa kendala dalam hal distribusi dan masyarakat yang belum mengetahui produk pangan olahan dari program kebijakan pangan. Oleh karena itu pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan distribusi tersebut. Selain itu, pemerintah kabupaten kulon progo harus terus berupaya mensosialisasi program pangan olahan kepada seluruh masyarakat kabupaten kulon progo agar masyarakat berkesempatan ikut dalam mewujudkan kemandirian pangan kabupaten kulon progo.

Kata kunci : keberhasilan kebijakan, ketahanan pangan, kemandirian pangan

## **A. Pendahuluan**

Pada masa Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, strategi pembangunan pertanian yang dipilih masih tidak jauh berbeda dengan strategi para pendahulunya, walaupun telah secara eksplisit meletakkan “kedaulatan pangan” sebagai kosa kata sentral, baik dalam dokumen resmi negara, maupun dalam pembicaraan dan diplomasi, yang tentu masih memerlukan penjabaran lebih rinci. Misalnya, di

dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.<sup>1</sup>

Tetapi persoalan yang melingkupi pembangunan pertanian Indonesia masih belum beranjak dari beberapa hal krusial berikut : kapasitas produksi pertanian, khususnya pangan sudah menurun, baik kualitas sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Sementara itu, upaya peningkatan produksi pangan tidak banyak di dorong oleh perubahan teknologi pertanian dan adaptasi inovasi baru, Sehingga walaupun terdapat kinerja produksi pangan yang meningkat, maka peningkatan tersebut tidak serta-merta mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Memperhatikan permasalahan dan potensi yang ada, pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu; melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. <sup>2</sup>

Dengan adanya Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. karena pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan mewujudkan daerah yang berkualitas, tetapi masih ada beberapa daerah yang masih sangat miskin ketahanan pangan atau rawan ketahanan pangan, padahal kaya akan sumber daya alam. Seperti salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang berada di Pulau Jawa yaitu Kulonprogo. Berdasarkan data Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kehutanan (KP4K), pada tahun 2013, ada 34 desa yang menyandang status rawan pangan pada Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya pada tahun 2016, Berdasarkan data yang diterima Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY, masih ada Sebanyak 20 desa di Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan masih rawan terjadi kekurangan pangan. Daerah yang paling terkena dampak rawan pangan berada di Kulonprogo, sebanyak sembilan desa. Disusul oleh Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Sementara untuk Sleman, tak ada satu pun desa yang tergolong rawan kekurangan pangan.

---

<sup>1</sup> Arifin B, 2015, *Ekonomi Pembangunan Pertanian*, Bogor, IPB Press. Hal. vi

<sup>2</sup> Arifin B, 2015, *Ekonomi Pembangunan Pertanian*, Bogor, IPB Press. Hal. vii

Namun dari data yang diperoleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kehutanan (KP4K) dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY dari tahun 2013 hingga 2016 kemajuan ketahanan pangan Kabupaten Kulonprogo mengalami penurunan dari 34 desa yang mengalami rawan pangan masih ada 9 desa pada tahun 2016. Kemajuan ini tidak lepas dari pengaruh kebijakan Ketahanan Pangan yang ada pada Kabupaten Kulonprogo yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai keberhasilan kebijakan ketahanan pangan yang ada pada Kulonprogo pada masa kepemimpinan Hasto Wardoyo yang mana pada kepemimpinan Bupati sebelumnya, Kulonprogo masih banyak mengalami kerawanan pangan. Sehingga apa saja yang menjadi faktor-faktor keberhasilan dari kebijakan ketahanan pangan yang telah diterapkan oleh Hasto Wardoyo dan mana yang paling berpengaruh dari faktor tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo?
2. Faktor apa yang paling mempengaruhi keberhasilan kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo?

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di mana lembaga administratif publik mempunyai domain.<sup>3</sup>

### **2. Ketahanan Pangan**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nugroho Riant, 2014, *Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan)*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo. Hal. 132

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012. Vol.2

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil merata baik jumlah maupun mutu gizinya. Dimensi pembangunan ketahanan pangan sangat luas dan bersifat lintas sektor dengan pendekatan lintas disiplin. Ketahanan pangan merupakan prasyarat dasar yang harus dimiliki oleh suatu daerah otonom.<sup>5</sup>

Ketahanan Pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau.<sup>6</sup>

### 3. Kepemimpinan

Pengertian kepemimpinan sebagai atribut atau kelengkapan suatu kedudukan, diantaranya dikemukakan oleh Janda (dalam Yukl, 1989) sebagai berikut. "Leadership is a particular type of power relationship characterized by a group member's perception that another group member has the right to prescribe behavior patterns for the former regarding his activity as a group member". (Kepemimpinan adalah jenis khusus hubungan kekuasaan yang ditentukan oleh anggapan para anggota kelompok bahwa seorang dari anggota kelompok itu memiliki kekuasaan untuk menentukan pola perilaku terkait dengan aktivitasnya sebagai anggota kelompok).<sup>7</sup>

## D. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan peneliti ialah penelitian analisis kualitatif yaitu penelitian dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan.<sup>8</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer ialah sumberdaya yang di peroleh secara langsung sebagai hasil pengumpulan peneliti sendiri yang berupa kata atau frase yang di peroleh melalui pengamatan dan wawancara. Selanjutnya, data sekunder ialah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Indra G, Drajat M, Dan Yayuk F, 2008 "Kajian Kebijakan Anggaran Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lampung Barat (*A Study On Budget Policy To Support Food Security In Lampung Barat District*), *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 3(3): 144 – 148. Vol. 1

<sup>6</sup> Rosdiana H, Dkk. "Meningkatkan ketahanan pangan melalui pembangunan agropilitan". Jakarta: UI Press.

<sup>7</sup> Wibowo,U.B. 2011. "Teori Kepemimpinan". BKD Kota Yogyakarta: *Jurnal Teor Kepemimpinan*. vol 3.

<sup>8</sup> Sugiyono. 2014. "*Metode Penelitian Manajemen*". Bandung : Penerbit Alfabeta. Hal. 347

<sup>9</sup> Ibid.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data yang di perlukan ialah : wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>10</sup> Wawancara dilakukan terhadap Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kehutanan (KP4K) Kulon Progo. Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias dan Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Kelautan perikanan dan peternakan serta 7 masyarakat asli Kabupaten Kulon Progo. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu bertemu langsung dengan masyarakat asli Kulon Progo yang sedang bekerja di sawah atau kebun dan melihat peralatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mendukung pertanian masyarakat serta Dokumentasi berupa Renstra BKP Kulonprogo tahun 2010 – 2014, RPJMD 2011-2016 Kabupaten Kulon Progo, Renstra KP4K Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016, Laporan SKPG KP4K Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 dan Data Kulon Progo dalam angka. Selanjutnya, Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu melalui 3 tahap, yaitu:<sup>11</sup> Reduksi Data, Penyajian Data dan verifikasi. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, di cari pola dan temanya. Data Display (Penyajian Data) berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Conslusion Drawing/ Verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan hipotesis/teori.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Arti Penting Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kulon Progo**

Kabupaten Kulon Progo ternyata memang sangat fokus terhadap ketahanan pangan nya karena Pangan merupakan hal yang paling penting dalam perekonomian Kabupaten Kulon Progo dengan alasan : Pangan tidak bisa digantikan, masih ada desa rawan pangan, kemiskinan + Jumlah penduduk naik, Jumlah petani dan kapasitas produksi terancam turun dan ancaman globalisasi & konversi bahan pangan untuk energi. Sebenarnya, Kabupaten Kulon Progo tidak lagi fokus pada Ketahanan Pangan tetapi Kemandirian Pangan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap setelah kemandirian pangan ini Kabupaten Kulon Progo bisa mencapai Kedaulatan Pangan meskipun Kedaulatan pangan harus pada

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-analisis-data-menurut-ahli.html>

diakses pada tanggal 14 oktober 2016, 06.00 WIB

tataran Nasional. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap bisa mencapai Kedaulatan Pangan agar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bisa mengatur dirinya sendiri, mencukupi kebutuhan pangan sampai pada tingkat individu tidak lagi pada tingkat rumah tangga seseuai dengan Undang-undang yang baru.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan Kemandirian Pangan yaitu dengan adanya Kebijakan dan Program Kebijakan Kemandirian Pangan yang sudah terimplementasi sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan dan rawan pangan di Kabupaten Kulon Progo ini.

Selain, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, ketahanan pangan juga penting menurut masyarakat dan masyarakat sangat mendukung dengan adanya lembaga yang dibentuk pada masa Pemerintahan Bapak Hasto Wardoyo yaitu adanya Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo. Justru masyarakat tidak terima lembaga ini hanya pada tataran aselon 3 karena masyarakat menganggap memang butuh lembaga yang menaungi khusus dalam hal ketahanan pangan. Bahkan, masyarakat Kabupaten Kulon Progo membentuk suatu aliansi dan melakukan audiensi dengan DPRD dan Bupati sampai kepada Biro Hukum Daerah Istimewah Yogyakarta agar lembaga ini tidak hanya pada tataran aselon 3 tetapi aselon 2.

## **2. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo**

Dari banyak program pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo terimplementasi dengan baik. Itulah alasan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bisa mengurangi angka kemiskinan yang tinggi menjadi relatif rendah yaitu dari 34 desa rawan pangan menjadi 9 desa rawan pangan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai program keunggulan yang pro masyarakat dibandingkan daerah lain seperti Bela-Beli Kulon progo, maka dari itu KP4K adalah tindak lanjut dari jargon Bela-Beli Kulon Progo yaitu “Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe”. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai langkah-langkah yang sangat baik selain program dari Pusat dan Provinsi. Pemerintah Kulon Progo saling membangun koordinasi setiap SKPD khususnya hal pangan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo terus koordinasi dengan SKPD lainnya.

Tetapi bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hal yang paling penting untuk dipikirkan dari terimplementasikannya program pangan ini ialah Distribusi Pangan. Kemudian kebijakan pemerintah yang pro kebijakan pangan. Maka dari itu di Kabupaten Kulon Progo terdapat

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) untuk mensukseskan kebijakan serta program pangan yang ada dalam upaya distribusi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga menginstruksikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya untuk mengkonsumsi berasnya petani 10 kg/bulan yang disediakan atau dicukupi oleh Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Sehingga, GAPOKTAN sudah mempunyai pasar tetap dan setiap bulan harus butuh 13 ton untuk beras PNS.

Selanjutnya terkait dengan Beras Daerah (RASDA). Beras Raskin sebelumnya tidak jelas asalnya. Tetapi sekarang beras RASDA harus dicukupi dari daerah yang dicukupi dari GAPOKTAN, jadi setiap bulan GAPOKTAN memproduksi beras yang dibutuhkan secara tetap untuk RASDA setiap bulan 750 ton. Jadi petani serta GAPOKTAN sudah mempunyai pasar tetap sehingga banyak uang beredar di Kabupaten Kulon Progo ini dan petani daerah sangat diuntungkan dan aman. Ditambah lagi dengan adanya program Bupati yaitu Bela-Beli Kulon Progo, masyarakat akan sangat diberdayakan dan masyarakat merasa aman secara ekonomi.

Selain terimplementasikannya kebijakan Ketahanan pangan di bidang Pertanian juga ada di bidang batu dan Kerajinan Batik. Program di bidang batu adalah Batu Andesit, batu yang biasa dibuat paping, sekarang banyak masyarakat menggunakan batu andesit. Kemudian di bidang Kerajinan Batik yaitu Batik Geblek Renteng. Ini semua adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

### **3. Kondisi Pangan Kabupaten Kulon Progo Pada Masa Pemerintahan Hasto Wardoyo**

#### **a. Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2006 - 2013 terjadi surplus beras dan pangan setara beras di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 01

Produksi Beras dan Produksi Setara Beras  
Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2013

No	Jenis/Macam	2009	2010	2011	2012	2013
1	Produksi Beras (kg)	79.773.000	72.976.000	84.119.000	84.848.000	73.837.000
2	Kebutuhan Beras (kg)	40.554.000	40.338.000	39.353.000	38.655.000	38.085.000
3	Surplus	39.219.000	32.638.000	44.766.000	46.193.000	34.8000

	Beras (kg)	00	00	00	00	
--	------------	----	----	----	----	--

Sumber : *RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016*

Untuk ketersediaan protein hewani di Kabupaten Kulon Progo masih tersedia pada ikan.

Tabel 02

Ketersediaan Ikan Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2013

No	Tahun	Ketersediaan Ikan (Kg/kap/th)
1	2009	15,61
2	2010	16,67
3	2011	18,85
4	2012	19,60
5	2013	21,25

Sumber : *Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Kulon Progo, 2013, diolah*

b. Akses Pangan

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo ada beberapa permasalahan yang menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses pangan tersebut yaitu :

- 1) Angka kemiskinan tinggi sehingga masyarakat tidak mampu membeli
- 2) Kondisi masyarakat yang cacat
- 3) Keterbatasan barang
- 4) Sarana dan prasarana Infrastruktur yang kurang memadai

Sekarang daya beli masyarakat sudah relatif lebih baik dari sebelum masa kepemimpinan Bapak Hasto Wardoyo karena Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dalam segi ekonomi berkomitmen mengurangi Angka Kemiskinan masyarakat. Jika kemiskinan berkurang akses pangan akan lebih mudah.

Tabel 03

Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2014

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persen (%)
2009	205,585	89,91	24,65
2010	225,059	90.06	23.15
2011	240,301	92.76	23.62



2012	250,854	93.21	23.31
2013	259,945	86.50	21.39
2014	265,575	84.67	20.64

Sumber: *Susenas 2002-2013, BPS*

Pemerintah Kulon Progo juga langsung turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang cacat, jadi masyarakat yang cacat tidak harus ke pasar, tetapi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sendiri yang akan memberikan pangannya secara langsung kepada masyarakat yang mengalami cacat.

Tabel 04

Penyandang Cacat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Penyandang Cacat	6.006	6.173	5.914	4.591	4.546

Sumber : *RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016*

Untuk permasalahan keterbatasan barang Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai program untuk membuat pangan menjadi beranekaragam sehingga terpenuhi kebutuhan masyarakat dan pangan selalu tersedia.

Selanjutnya dalam hal sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus berupaya memperbaiki infrastruktur agar masyarakat mudah mengakses pangan sampai pada masyarakat yang tinggal jauh dari tempat akses pangan.

a. Penyerapan Pangan

Di Kabupaten Kulon Progo jumlah penduduk semakin banyak atau meningkat maka daya serap pangan jagan semakin banyak dan meningkat. Meskipun jumlah penduduk tetapi jumlah konsumsi beras menurun. Hal ini yang membuat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bangga karena penurunan konsumsi beras ini adalah salah satu program Pemerintah. Sebelumnya konsumsi beras pada masyarakat Kulon Progo setiap tahun 83 kg perkapita turun menjadi 79,9 kg perkapita, ini adalah penurunan yang cukup baik. Program penurunan konsumsi beras oleh Pemerintah Kulon Progo dilakukan dengan alasan Produksi beras di Kabupaten Kulon Progo semakin berkurang, banyak lahan yang beralih fungsi dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Jadi dari sisi penyerapan konsumsi beras semakin berkurang.

Meskipun, Pemerintah Kulon Progo menurunkan konsumsi beras tetapi Pemerintah Kulon Progo meningkatkan konsumsi pangan lokal. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya mengembalikan

masyarakat pada tradisi jaman dahulu yaitu mengkonsumsi pangan lokal, yaitu dengan cara beralih dari beras ke pangan lokal. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak ingin masyarakat terus ketergantungan karbohidrat hanya pada beras, harus memanfaatkan dengan baik pangan lokal yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan juga berupaya meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat Kulon Progo, karena tingkat penyerapan konsumsi ikan masih rendah dan masih jauh dibandingkan dengan skala Nasional. Tingkat konsumsi makan ikan masyarakat Kabupaten Kulon Progo masih sekitar 22 kg perkapita/tahun, sedangkan Nasional berada di angka 40'an kg perkapita/tahun.

Penyebab rendahnya penyerapan konsumsi ikan pada masyarakat Kulon Progo disebabkan karena masih adanya budaya jawa pada umumnya yang mengatakan bahwa makanan tahu dan tempe itu adalah ikan. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Kulon Progo terutama Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan membuat program dan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat Kulon Progo agar permasalahan dari kurangnya gemar makan ikan di masyarakat bisa diatasi. Selain itu, Pemerintah juga melatih masyarakat Kulon Progo cara mengelolah ikan agar disenangi terutama anak-anak TK dan SD. Karena target utama dari program edukasi ini adalah anak-anak TK dan SD yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Walaupun capaian targetnya baru bisa dilihat 5 sampai 10 tahun mendatang karena anak-anak TK dan SD adalah generasi penerus.

Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan, selain beras, jagung dan kedelai juga ada penyerapan dari buah-buahan yaitu buah durian dan cabe. Tetapi yang lebih banyak yaitu cabe. Dinas Pertanian dan Kehutanan terus berupaya meningkatkan produktivitas dari tanaman buah durian dari mulai penanaman yang baru, pemeliharaan yang berupa memberikan pupuk hingga pendistribusian. Untuk distribusinya itu dijual dengan pemborong melalui ULP jika diatas 200 juta.

#### b. Stabilitas Pangan

Stabilitas Pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo masih terjaga. Selain, upaya dari pemerintah untuk selalu menjaga stabilitas pangan yang ada di Kulon Progo, petani, GAPOKTAN dan KWT juga membantu agar kesediaan pangan tetap stabil, begitu juga stakeholder yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

#### b. Status gizi masyarakat

Status gizi di Kabupaten Kulon Progo khususnya dalam hal pangan digambarkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan konsumsi keanekaragaman. PPH di Kabupaten Kulon

Progo mengalami fluktuasi tetapi semakin membaik. Karena konsumsi masyarakat mulai beranekaragam yang sejalan dengan program Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Jadi PPH Kabupaten Kulon Progo setiap tahun selalu meningkat dan kerana fluktuasi kadang kondisional juga karena konsumsi masyarakat rendah.

Dari sisi nutrisi Kabupaten Kulon Progo sudah sangat memadai dari Standar Nasional tetapi belum menunjukkan angka yang ideal yaitu yang seharusnya 2000 kg kalori perkapita/hari, Kabupaten Kulon Progo baru di angka 1850'an.

#### **4. Beberapa Kebijakan dan Program Inovasi dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Masa Pemerintahan Hasto Wardoyo**

- a. Slogan/gerakan Bela-Beli Kulon Progo produk lokal : agar terlebih dahulu tercipta pasar (penguasaan pasar sendiri)
- b. Agrobisnis dan agro industri dikemas dalam sistem ekonomi kerakyatan yang bisa diakses oleh masyarakat/Pem-Desa
  - 1) Penerapan teknologi Merubah Gula Merah menjadi Gula Semut (gula kristal)
  - 2) Produk industri air mineral kemasan, "Air Ku"
  - 3) Mengganti Raskin Dengan Rasda (beras Daerah)
  - 4) Kopi Khas Puncak Suroloyo
  - 5) Teh Kulon Progo

#### **5. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Kabupaten Kulon Progo**

- a. Komunikasi (Strategi) Pemerintah dalam memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan

- 1) Komunikasi Internal Birokrasi

Dalam mengimplementasikan program kebijakan ketahanan pangan nya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membangun komunikasi yang sangat baik dan membangun kerjasama yang baik antar SKPD yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas Petanian dan kehutanan, serta Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian perikanan dan Kehutanan. Ketiga SKPD ini bersama-sama bekerja untuk meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo hingga mencapai kedaulatan pangan. Kerjasama Ketiga Dinas ini dilaksanakan dari program, sosialisasi atau penyuluhan hingga menjalankan program dan kegiatan.

Dalam hal administratif Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan menginput data yang ada di kedua dinas tersebut dalam hal pangan. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan juga melakukan distribusi hasil olahan pangan yang telah dihasilkan oleh

kedua dinas tersebut. Tetapi untuk pelaksanaannya tetap di GAPOKTAN atau Kelompok Tani.

Bentuk kerjasama rill nya antar SKPD ini dari segi Sumber Daya Manusia nya, yang jika sewaktu-waktu saling membutuhkan tanpa mencampuri urusan atau tugas pokok masing-masing SKPD

## 2) Komunikasi Eksternal kepada Masyarakat

Pemerintah Kulon Progo menggunakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Strategi yang digunakan oleh Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat ialah tetap konsisten pada jadwal atau pola tanam masyarakat yaitu Padi-Padi-Palawija dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo konsisten mendorong regulasi menjadi hal yang terpenting. Regulasi ini salah satunya Peraturan Bupati tentang Tata Tanam Nomor 28 tahun 2015, yang dibuat setiap tahun dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti Petani, GAPOKTAN, Kelompok Tani dan semua stakeholder terlibat disana.

Tetapi sebelum membuat kesepakatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan sosialisasi program terlebih dahulu kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan di Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan yaitu melakukan sosialisasi dengan penentuan Calon Tani Calon Lokasi (CPCL ) pada di kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) .

Sebelum menjalankan program dan kegiatan, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan melakukan sosialisasi tentang manfaat dari mengkonsumsi ikan yang berkaitan dengan nilai gizinya yang ternyata lebih baik dari daging hewan ternak. Seperti mengkonsumsi ikan tidak mengandung lemak jenuh dan daging banyak mengandung lemak jenuh.

Selain sosialisasi dan komunikasi dengan Kelompok Ikan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat agar program pangan ini dapat terimplementasikan dengan baik yaitu membuat program yang mengajak masyarakat untuk menyenangi makan ikan.

Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan masyarakat yang ingin meminta bantuan dalam hal benih ataupun fasilitas itu juga ada sosialisasi dilakukan oleh petugas sosialisasi yang dilakukan di Desa.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tidak terlepas dari kepala daerah terutama komunikasi yang terjalin antara kepala daerah kepada internal pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu selain dari Lembaga Pemerintah, juga ada bentuk komunikasi yang dibangun oleh Bapak Hasto Wardoyo yaitu dengan menghadiri setiap

kegiatan yang berkaitan dengan Pangan dari mulai Deklarasi Bela dan Beli Kulon Progo pada tanggal 25 Maret 2013, Deklarasi Mandep Mantep Pangane Dewe pada tanggal 19 Juli 2013, Workshop penyusunan draf kebijakan (policy brief) pada tanggal 19 November 2014 hingga Lokakarya Penyusunan Strategi Implementasi Rasda 12-13 maret 2015. Dengan begitu masyarakat bisa berinteraksi secara langsung dan masyarakat bisa merasakan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan Kebijakan dan Program Pangan.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat mempengaruhi indikator dari ketahanan pangan terutama akses dan stabilitas pangan. Karena dengan adanya komunikasi yang baik maka masyarakat bisa menyampaikan apa permasalahan yang ada dalam mengakses pangan yang juga berdampak kepada stabilitas pangan.

b. Sumber Daya Yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo

1) Sumber Daya Manusia Yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah membuka lebar pintu kerja sama kepada stakeholder yang bersedia bekerja sama, jadi tidak hanya kerjasama antar pemerintah dan petani sebagai sumber daya manusia nya tapi juga stakeholder lain yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian seperti perguruan tinggi, perbankan, asosiasi dan lain-lain, selama itu untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo dan saling menguntungkan untuk kesejahteraan petani Kabupaten Kulon Progo tanpa ada batasan.

Jadi tidak hanya kerjasama bentuk terjun ke lapangan saja tetapi juga administrasi dan pengitungan anggarannya juga bekerjasama dengan stakeholder, seperti kerjasama dengan Perguruan tinggi Universitas Gajah Mada (UGM) yaitu Farm Record yaitu pencatatan usaha tani, sharing anggaran, dan membuat software untuk pencatatan usaha tani.

Kemudian kerjasama yang langsung ke lapangan yaitu berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dikirim dari beberapa Perguruan Tinggi. Aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pangan masyarakat akan disampaikan kepada Perguruan tinggi kemudian pada saat KKN Tematik dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pangan .

Selain itu ada Desa Binaan yang salah satunya bekerjasama sama dengan Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), setiap tahun selalu berkoordinasi dengan Dekan dan tenaga ahli dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

untuk membangun desa. Desa yang dibina oleh mahasiswa-mahasiswi UMY yaitu di Desa Kranggan Kecamatan Galur. Kemudian ada Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UMY. Di bidang teknologi untuk olahan pangan lokal seperti kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mercubuana. Sebelumnya hasil pangan lokal hanya diolah secara tradisional. Selain KP4K, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan juga bekerjasama dengan perguruan tinggi seperti UGM di Fakultas pertanian, kedokteran hewan dan peternakan. Selain itu, Dinas ini juga bekerjasama ke perusahaan swasta.

Pada Dinas Pertanian dan kehutanan bentuk kerjasama yang terjalin ialah kerjasama dengan perguruan tinggi dan TNI. Kerjasama ini dilakukan oleh menteri pertanian dengan melakukan MOU kepada perguruan tinggi dan TNI. Kerjasama melalui MOU dengan TNI berupa membantu swasembada membantu dilapangan, meyerap gabah, mempercepat tanam, dan lainnya. Karena

## 2) Sumber Daya Berupa Fasilitas

Di Kabupaten Kulon Progo pemerintah menyiapkan fasilitas dan memberikan fasilitas itu kepada masyarakat dengan berupa hibah atau bantuan dari permohonan proposal atau lainnya. Diantaranya pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian ada pemberian fasilitas untuk budidaya ikan diberikan setiap tahun yaitu berupa peralatan 1 paket budidaya ikan lele, 1 paket budidaya ikan gurami dan ikan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Selain itu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan juga memberikan benih ikan dan ternak seperti anak kambing, sapi dan lainnya. Jadi tidak hanya perkataan saja tetapi juga dengan bukti berupa fasilitas, sehingga masyarakat juga berupaya meningkatkan produksi bersama pemerintah.

Tidak berbeda jauh dengan yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan, dinas ini juga memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa peralatan pengelolah tanah yang berbentuk kaki tiga atau angkong.

Tidak hanya fasilitas berupa peralatan, Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan dana yang ada juga memberikan fasilitas kepada petani berupa benih-benih tanaman buah-buahan dan sayur, termasuk pupuk.

Penyediaan Fasilitas yang diberikan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo membantu masyarakat agar terwujudnya ketahanan pangan yaitu terdiri dari beberapa fasilitas. Contohnya, pada kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dilakukan dengan

pemberian fasilitas berupa : Pertama, Pendampingan. Kedua, Unit Distribusi itu Finansial yang berupa pemberian uang kepada lembaga dan kemudian untuk cadangan pangan, Pemerintah memberikan uang untuk keperluan membeli gabah dan beras untuk disimpan didalam GAPOKTAN LDPM.

Kemudian selain fasilitas diatas, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo juga memberikan fasilitas dalam pegadaan RASDA kepada GAPOKTAN dan Kelompok Tani yaitu berupa : untuk perbaikan RMU terkait dengan gilingan, alat pengering, traktor roda 4 dan roda 2, alat panen. Termasuk kemudahan dalam memperoleh benih dan pupuk dan lain-lainnya. Regulasi yang berupa Peraturan Bupati terkait Tata Tanam juga termasuk fasilitas yang berupa aturan.

3) Sumber Pendanaan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo

Dana yang digunakan untuk mengimplementasikan Kebijakan dan program ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo sejauh ini keseluruhan didanai oleh pemerintah. Belum ada sumbangan dana dari pihak swasta maupun stakeholder untuk mengimplementasikan kebijakan atau program pangan yang dijalankan. Pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan bentuk kerjasama dengan perusahaan swasta hanya berbentuk dukungan terkait dengan DEM area, tetapi secara keseluruhan tetap di danai oleh pemerintah. Selain itu bentuk kerjasamanya ialah untuk menunjukkan produk pertanaman pertanian yang mereka hasilkan dan ada DEM nya serta dibiayai oleh pemerintah.

Tidak berbeda dengan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo, pada Dinas Kelautan Pertanian dan Peternakan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan sumber dana berasal dari Pemerintah yaitu dari sumber dana APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.

Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan sumber pendanaannya juga ada yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo seperti ada CSR dari BMUN Pertamina untuk pembiayaan pupuk dan CSR dari BI.

Pada pembiayaan beras menur semuanya pembiayaan dari BI, mempunyai CRS dibina dalam 3 tahun dan hasil beras nya bersertifikat organik dan diakui secara nasional dan sudah masuk di supermarket.

Meskipun upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo setiap tahun menambah anggaran untuk Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pertanian Perikanan Kehutanan, tetapi anggaran masih belum cukup untuk menjalankan program dan kegiatan yang ada sehingga KP4K menjalankan program prioritas guna untuk menghemat anggaran. Berikut realisasi penyerapan belanja KP4K pada tahun 2015.

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sumber dana dari APBD Kabupaten pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.813.472.067,- (98,07%) dari target belanja langsung sebesar Rp. 1.911.547.005,- .

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar Rp.1.180.217.195,- (98,64%) dari target sebesar Rp. 1.196.444.355,-dan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar Rp.696.160.588,-(97,35%) dari target sebesar Rp 715.102.650,-

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 0.5

Rencana Anggaran dan Realisasi Belanja  
Terhadap Sasaran Strategis Kantor KP4K Kabupaten Kulon Progo Tahun  
2015

Sasaran	KINERJA				KEUANGAN (Rp)			
	Indikator	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Capaian PPH	91	93,10	102,31	Peningkatan Pemberdayaan Penyuluhan	1.077.569.355	1.064.049.775	98,74
					Peningkatan Ketahanan Pangan	118.875.000	116.167.420	97,72
					Jumlah	1.196.444.355	1.180.217.195	98,64

Sumber : Laporan SKPG KP4K

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran mencapai 98,64% dan realisasi kinerja mencapai 102,31% (Efisien).

Hal ini terjadi karena mengoptimalkan sumberdaya aparat yang ada di Kantor KP4K Kabupten Kulon Progo meliputi Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 79 orang, THL-TBPP sebanyak 62



orang, Pejabat Struktural yang membidangi teknis dilapangan sebanyak 3 orang dan dengan mengoptimalkan sumberdaya lainnya berupa sarana dan prasarana penyuluhan yang dimiliki.

Selanjutnya upaya dalam mengimplementasi kebijakan pangan ini juga dilakukan oleh Bapak Bupati Hasto Wardoyo sebagai Kepala Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak hanya melibatkan internal pemerintah tetapi secara langsung melibatkan petani dengan membentuk GAPOKTAN, Kelompok Ikan, Kelompok Ternak dan lainnya. Selain itu, juga mengajak stakeholder yaitu BULOG khususnya untuk beras karena Bupati Hasto wardoyo ingin Kabupaten Kulon Progo memproduksi beras sendiri dan memiliki beras premium khas Kulon Progo. Selain itu ada dukungan dari segi finansial atau anggaran dan fasilitasnya. Setiap tahun anggaran ditambah dalam skala prioritas I yaitu untuk program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah. Dari dukungan sumber daya fasilitasnya setiap tahun meningkat. Dukungan fasilitas pemerintah seperti yang ada pada tabel.

Tabel 0.6

Dukungan Fasilitas Pemerintah

No	Nama Gapoktan	Dukungan Fasilitas Pemerintah		
		2014	2015	2016
1	Panca Manunggal	Rev RMU Rp.195 Jt Dryer Rp.180 Jt		
2	Makmur Sejahtera	Rev RMU Rp.195 Jt		
3	Among Tani		Rev RMU Rp.195 Jt	
4	Sido Maju		Rev RMU Rp.195 Jt	Dryer Rp.187 Jt
5	Sari Mulyo		Rev RMU Rp.195 Jt	
6	Ngesti Raharjo		Rev RMU Rp.195 Jt	

Sumber : *Proposal Proyek Perubahan Revitalisasi Rasda*

Tabel 0.7  
Kerangka Pendanaan Alokasi Belanja Kapasitas Rill Keuangan Daerah  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

No	Jenis Data	Alokasi					
		2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Prioritas I	237.487.829.024	57,43	289.594.066.405	63,75	272.159.267.954	59,14

Sumber : DPPKA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014, dan hasil analisis

b. Sikap Birokrasi/Pelaksana (Komitmen) dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo  
Sikap birokrasi khususnya dalam komitmen mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan ini sangat tinggi, maka dari itu pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk suatu SKPD yang dikhususkan menangani permasalahan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan membentuk Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan. Itu salah satu keseriusan pemerintah dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan karena pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus disiapkan.

Kemudian keseriusan dan komitmen dari Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan ini sendiri dalam menangani permasalahan ketahanan pangan yaitu menuangkan program bupati ke dalam Renstra yang kemudian akan menjadi program/kegiatan untuk pangan.

Pemerintah tidak hanya komitmen kepada pangan pertanian saja, tetapi juga perikanan dan kelautan, karena pangan tidak hanya berasal dari tanaman tetapi juga ternak, ikan dan lain-lainnya.

Selanjutnya, Sikap Bapak Hasto Wrdoyo terkait dengan komitmen dalam mengimpelentasikan kebijakan pangan yaitu dengan membuat Peraturan Bupati No 28 tahun 2015 tentang Tata Tanam yang dibuat setiap tahun dengan melibatkan masyarakat, menjalain kerjasama dengan BULOG yaitu dengan adanya MoU Bupati dengan Divre DIY tentang pengadaan Rasda pada tanggal 30 desember 2013, adanya SK Bupati KP Nomor 421/A/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantau Rasda dan Beras PNS dan Bupati mengusulkan program Rasda diapresiasi Presiden dan Wakil Presiden (13 Februari 2015)

### c. Struktur Organisasi

Pada Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo yang menaungi khusus ketahanan pangan ialah Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo. Struktur organisasi lembaga ini masih setingkat aselon 3.

Di Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo ini terdapat banyak SOP dan mereka bekerja berdasarkan SOP yang ada. Beberapa SOP seperti SOP tentang Penumbuhan Kelompok Tani, Beras PNS dan RASDA.

Indikator dari implementasi kebijakan publik semuanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, tetapi yang paling berpengaruh dari Indikator Implementasi Kebijakan Publik yaitu komunikasi dan komitmen Pemerintah khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Jika terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder sangat mudah untuk mengimplementasikan kebijakan pangan ini dengan mudahnya menjalin kerjasama. begitupun komitmen jika pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan program ini maka masyarakat juga tidak akan banyak yang akan ikut berpartisipasi mensukseskan kebijakan dan program pangan.

Tetapi, Faktor yang paling mempengaruhi yaitu Komunikasi. Komunikasi yang baik antar pemerintah kepada masyarakat maupun stakeholder akan membuat kebijakan atau program berjalan dengan baik. Sikap pemerintah dalam dal ini komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan programnya akan terlihat dengan adanya komunikasi yang baik dari pemerintah. Selain itu masyarakat juga dengan mudah memberikan masukan kepada pemerintah. Sumber daya yang terlibat juga akan semakin banyak dalam mensukseskan kebijakan pangan karena banyaknya stakeholder yang terlibat dan struktur pemerintah akan semakin baik dengan adanya komunikasi dengan masyarakat karena adanya dukungan yang kuat dari masyarakat.

## 6. Kontribusi Ketahanan Pangan

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor dominan di Kabupaten Kulon Progo dengan sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 23,26% (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2006 menjadi 22,87% pada tahun 2013. Berikut tabel jumlah sub sektor tanaman bahan makanan memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB di sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 22,87% yang terdiri dari:

Tabel 08  
Kontribusi Sub Sektor dalam PDRB di sektor pertanian pada tahun 2013

Sub Sektor	Jumlah (%)
Tanaman bahan makanan	13,25%
Peternakan	5,95%
Kehutanan	1,85%
Perkebunan	1,23%
Perikanan	0,59%

Sumber : *RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016*

Dari tabel angka kemiskinan di atas, ketahanan pangan juga berpengaruh dalam mengatasi angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo terlihat dari Kontribusi Sektor pertanian menjadi salah satu sektor dominan di Kabupaten Kulon Progo dengan sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 23,26% pada tahun 2013 karena pertanian merupakan induk dari ketahanan pangan selain bidang perikanan dan peternakan. Selain itu di buktikan dengan berkurangnya desa Rawan Pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan adanya program ketahanan pangan.

Tabel 09  
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2014

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persen (%)
2011	240,301	92.76	23.62
2012	250,854	93.21	23.31
2013	259,945	86.50	21.39
2014	265,575	84.67	20.64

Sumber: *Susenas 2002-2013, BPS*

Selain di ukur dari indikator diatas dan menurunnya angka kemiskinan, kemajuan ekonomi Kabupaten Kulon progo yang sebagian disebabkan oleh kontribusi dalam bidang pertanian yaitu dapat dilihat dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dan menurunnya angka pengangguran. Ditambah lagi respon masyarakat yang menyatakan program pangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat membantu terutama RASKIN dan benih. Meskipun ada beberapa masyarakat yang belum mengetahuinya.

Tabel. 10  
 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah  
 Kabupaten Kulon Progo 2013-2014

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan Asli Daerah	95.991.512. 851	130.749.420. 952	163.301.311. 295	177.967.394. 651

Sementara itu tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo relatif rendah. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007-2012 fluktuatif pada kisaran 2,5% 4,5%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007 sebesar 4,34 persen, menjadi 3,56 persen pada tahun 2008, sebesar 4,31 persen pada tahun 2009, sebesar 4,18 persen pada tahun 2010, sebesar 2,56 persen pada tahun 2011, dan 3,91 persen pada tahun 2012.

**7. Tanggapan masyarakat Kabupaten Kulon Progo terkait dengan Kebijakan dan Program pangan dan Analisis terkait Tanggapan masyarakat**

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat Kabupaten Kulon Progo mengenai bagaimana tanggapan masyarakat Kabupaten Kulon Progo tentang kebijakan dan program pangan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Serta bagaimana dampak yang dirasakan. Berikut hasil wawancara peneliti kepada beberapa masyarakat asli Kulon Progo.

- a. Dari hasil wawancara pertama yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Anto yang bekerja sebagai petani dan berusia 26. Menurut bapak Anto dari segi kelayakan konsumsi produk kulon progo itu layak konsumsi karena orang tuanya juga mengkonsumsi salah satu produk pangan kulon progo yaitu Raskin dan relatif murah dan hampir setiap Kepala Keluarga mendapatkan RASKIN. Tetapi kalau untuk konsumsi jenis pangan olahan lainnya belum ada di dusun nya dan belum ada efek yang sangat dirasakan. Selain itu dari segi pertanian sangat keberatan jika pupuk dialihkan dari pupuk briket (butir) ke pupuk tabur yang berasal dari subsidi pemerintah, karena hasilnya yang kurang memuaskan dan boros.
- b. Dari hasil wawancara kedua yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Ibu Wasri yang bekerja sebagai petani. Menurut Ibu Wasri, Ibu wasri tidak mengetahui mengenai RASDA dan RASKIN yang ada di Kabupeten Kulon progo.

- c. Dari hasil wawancara Ketiga yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Bapak Teguh Raharjo yang bekerja sebagai petani dan berusia 52 Tahun. Menurut bapak Teguh dengan adanya program bela-beli ini masyarakat tidak perlu lagi membeli ke tempat lain apa yang dibutuhkan. Kulon Progo sudah mempunyai kebutuhan tersebut seperti sawi, terong dan cabe dan bisa menanam sendiri. Kulon Progo juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Contohnya mempunyai batu alam, hanya saja masyarakat belum tahu apa manfaatnya. Pada saat adanya bandara baru produk Kulon Progo bisa di pasarkan disana. Dari segi konsumsi produk bela-beli bapak teguh mengkonsumsi air Kulon Progo dan menggunakan batik Renteng. Tetapi untuk RASKIN rasanya kurang enak di konsumsi dan berasnya sudah berwarna kuning-kuning, sehingga kurang layak untuk di konsumsi, seharusnya RASKIN itu layak dikonsumsi dan enak dimakan, kalau tidak layak dikonsumsi akan membuat masyarakat menjadi tidak sehat. Pada saat pembagian beras ada yang melakukan pungutan liar, yang seharusnya 1 karung 24.000 menjadi 29.000 dengan biaya di pungut 5000. Sementara pemerintah tidak mengetahuinya. Dari sisi Pertanian, Bibit benih yang di berikan pemerintah kurang bagus dari segi kualitasnya sehingga hasilnya kurang memuaskan, memang pemberian bibit secara gratis tapi dalam kondisi kualitas yang kurang baik. Sehingga masyarakat membeli bibit sendiri dari boyolali dan bantul.
- d. Dari hasil wawancara Keempat yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Ibu Rostina yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan berusia 53 Tahun. Menurut Ibu Rustina mengenai produk pangan lokal itu sudah ada air kulon progo yang yang telah dikonsumsi ketika ada yang menikah dan meninggal. Dan untuk RASKIN jika berasnya enak makan akan di makan untuk konsumsi sendiri, tetapi kalau tidak enak dijual lagi kepada masyarakat lain. Di RT ini hanya 5-6 orang yang mendapatkan RASKIN. Pembagian RASKIN dilakukan oleh pengurusnya dengan bayar 3000 biaya jalan, sedangkan harga berasnya 16.000 per 10 kg/bulan.
- e. Dari hasil wawancara Kelima yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Bapak Sumadi yang bekerja sebagai Petani dan berusia 40 Tahun. Menurut Bapak Sumadi dari segi konsumsi produk pangan lokal di Kabupaten Kulon Progo belum konsumsi , hanya kadang-kadang beli barang pangan tapi jarang dan kalau RASKIN bapak sumadi tidak mendapatkannya. Pak sumadi juga termasuk menjadi bagian Kelompok Tani juga, tapi tahun ini beli benih sendiri karena tidak mendapatkan bantuan, kalau tahun kemarin masih ada bantuan dari Pemerintah. Menurut bapak Sumadi bantuan yang diberikan pemerintah itu kualitasnya berbeda-beda.

Seperti tahun kemarin bantuannya dengan kualitas kurang bagus, 2 tahun sebelumnya dengan kualitas bagus. Walaupun sebenarnya sangat bermanfaat sekali bantuan yang diberikan tetapi kualitas bantuan itu kurang bagus. Bantuan yang didapatkan dari pemerintah berupa benih jagung dan benih padi yaitu cierang.

- f. Dari hasil wawancara Keenam yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Bapak Sumarjo yang bekerja sebagai Petani dan berusia 56 Tahun. Menurut Bapak Sumarjo dengan adanya RASKIN sangat bermanfaat, tapi benih yang diberikan kepada kelompok tani itu kualitasnya kurang bagus. Benih jagung yang diberikan ada yang pendek, ada yang tinggi dan putih-putih dan tidak berbuah sehingga kalau di tanam hasilnya tidak memuaskan dan di beberapa tanah tidak bisa ditanami benih jagung tersebut. Benih jagung yang diberikan yaitu jenis jagung NK13 dan Tongkol 2, Tetapi berbeda dengan benih padi yaitu benih cierang itu cocok untuk ditanam. Jika benih bantuan kualitasnya kurang bagus maka petani membeli sendiri bibit dari Jawa Timur.
- g. Dari hasil wawancara Ketujuh yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Bapak Aris yang bekerja sebagai Petani dan berusia 39 Tahun. Menurut Bapak Aris untuk RASKIN yang mendapatkannya adalah orang yang tidak mampu dan itu bermanfaat bagi masyarakat. Bantuan yang didapatkan untuk pertanian berupa benih padi dan peralatan bajak sawah untuk kelompok tani. Masing-masing kelompok tani mendapat 2 peralatan bajak sawah. Benih yang didapatkan berkualitas bagus. Untuk peternakan akan diberikan itik tapi belum di bagi.

## **8. Kesimpulan**

Peneliti menyimpulkan Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ketahanan pangan pada masa pemerintahan Bapak Hasto ini di pengaruhi oleh :

1. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggap Pangan penting karena pangan tidak bisa digantikan dan masih ada desa rawan pangan, kemiskinan + jumlah penduduk naik.
2. Pemerintah pada masa kepemimpinan Bapak Hasto Wardoyo sudah berbicara Kemandirian Pangan yang sebelumnya baru berbicara Ketahanan Pangan.
3. Kebijakan dan Program yang di buat Pro Ketahanan Pangan dan Pro Masyarakat terkhususnya petani.
4. SKPD yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Kehutanan

serta Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan, benar-benar berkomitmen dan bekerjasama membangun Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai target kemandirian pangan yang di inginkan.

5. Komunikasi dan kerjasama Pemerintah dan masyarakat sangat baik dalam hal ketahanan pangan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam kesuksesan ketahanan pangan ini terutama Petani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Ikan dan Kelompok Ternak.
6. Strategi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu mengikuti Pola Tanam Masyarakat Padi-Padi-Palawija sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pangan
7. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan membangun kerjasama dengan banyak pihak seperti, perguruan tinggi, perbankan, dan perusahaan swasta. Sehingga banyak stakeholder yang ikut mensukseskan ketahanan pangan pada Kabupaten Kulon Progo. Serta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuka kerjasama dengan siapa pun asalkan saling menguntungkan.
8. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setiap tahun menambah anggaran untuk mengatasi permasalahan pangan.
9. Pemerintah Kabupaten Kulon progo juga mengharuskan PNS membeli RASDA, dan RASKIN harus berasal dari beras RASDA sehingga Pasar Petani sudah ada.
10. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya menjaga stabilitas pangan dan ketersediaan pangan.
11. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mencari pasar untuk distribusi pangan masyarakat agar masyarakat merasa aman dari permasalahan ekonomi
12. Pemerintah Kabuapten Kulon Progo juga mempermudah Akses Pangan dengan memberikan atau menyediakan fasilitas untuk masyarakat.

Sementara, Faktor yang paling mempengaruhi yaitu Komunikasi. Komunikasi yang baik antar pemerintah kepada masyarakat maupun stakeholder akan membuat kebijakan atau program berjalan dengan baik. Sikap pemerintah dalam dal ini komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan programnya akan terlihat dengan adanya komunikasi yang baik dari pemerintah. Selain itu masyarakat juga dengan mudah memberikan masukan kepada pemerintah. Sumber daya yang terlibat juga akan semakin banyak dalam mensukseskan kebijakan pangan karena banyaknya stakeholder yang terlibat dan struktur



pemerintah akan semakin baik dengan adanya komunikasi dengan masyarakat karena adanya dukungan yang kuat dari masyarakat.

Kesimpulan yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara kepada masyarakat asli Kabupaten Kulon Progo. Meskipun Ketahanan Pangan Kulon Progo dinilai membaik dengan berkurangnya desa rawan pangan tetapi masyarakat Kulon Progo masih ada yang belum mengetahui tentang program pangan seperti bela-beli dan produknya. Selain itu dari sisi pertanian benih yang diberikan oleh pemerintah kualitasnya kurang bagus, begitu juga RASKIN, kualitasnya kurang bagus.

## **9. Saran**

1. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan tidak hanya berada pada tataran eselon 3, tapi perlu di tingkatkan menjadi eselon 2, karena Kabupaten Kulon Progo sangat memerlukan itu
2. Pemerintah tidak lagi mengalihkan fungsi lahan, karena salah satu permasalahan yang ada di kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan ketahanan pangannya yaitu banyaknya alih fungsi lahan.
3. Bentuk kerjasama untuk pendistribusian produk olahan pangan lokal alangkah lebih baiknya dibukakan toko khusus dan lebih baik lagi di jual di warung rakyat biasa tidak hanya di TOMIRA yang berupa ALFAMART yang tidak lain toko berjejaring modern yang membunuh warung rakyat kecil.
4. Pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan program bela-beli dan program lainnya yang berkaitan dengan pangan, karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang program dan produknya.
5. Pemerintah harus benar-benar membuktikan komitmennya untuk mensukseskan pangan Kabupaten Kulon Progo dengan pemberian benih-benih yang berkualitas, tidak hanya benih yang kualitasnya jelek dan yang asal-asalan yang penting gratis yang berakibat pada hasil panen yang tidak memuaskan di masyarakat
6. Pemerintah harus berupaya lagi untuk meningkatkan kualitas beras RASKIN, karena walaupun harganya murah masyarakat juga perlu konsumsi beras yang sehat.
7. Pemerintah harus benar-benar mengawasi pembagian beras RASKIN agar tidak ada pungutan liar yang akan berdampak negatif bagi pemerintah dan merugikan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirian, dkk. 2008. “Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Sawah Di Wilayah *Enclave Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Food Security of Wet Land Farmer Household in Enclave Region of Bukit Barisan Selatan National Park)*”. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 3(3): 132 – 138
- Arifin, B. 2015.” *Ekonomi Pembangunan Pertanian*”. Bogor: IPB Press.
- Asmara, Qiqi. 2009. “Evaluasi implementasi”. FISIP UI: *Jurnal Kebijakan*.
- Mulyadi, dedi. 2016. “*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*”. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. “Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009(*General Policy on Food Security, 2006 – 2009*)”,*Jurnal Gizi dan Pangan* 1(1): 57-63
- Dirhamsyah, T. dkk. 2016. “*Katahanan Pangan (Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Rawan Pangan di Jawa)*”. Yogyakarta : Plantaxia.
- Gunawan,Indra, Drajat M, dan Yayuk F. 2008. “Kajian Kebijakan Anggaran Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lampung Barat (*A Study On Budget Policy To Support Foo,d Security In Lampung Barat District*)”. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 3(3): 144 – 148
- Herawati, Tin. Dkk. 2011. “Ketahanan Pangan Keluarga Peserta Program Pemberdayaan Masyarakat Di Pedesaan (*The Food Security of The Family Participant in Community Empowerment Program At Rural Area*)”. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 6(3): 208-216
- Ketahanan Pangan, Universitas Sumatera Utara, *Jurnal Ketahanan Pangan*.
- Malik, H. 2014. “*Melepas Perangkap Impor Pangan*”.Yogyakarta : LP3ES.
- Mulcson Syaiful Anwar dan Didiek Rahmadi. “Analisis Potensi Dan Ketersediaan Pangan Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Pangan Di Jawa tengah”. Pusat Studi Agrobisnis dan Agroindustri Lemlit Undip. *Jurnal Litbang Universitas Muhamrnadiyah Semarang*

- Mulyadi, D. 2015. “*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik)*”. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2014. “*Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan)*”. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rivani, Edmira. 2012. “Penentuan Dimensi Serta Indikator Ketahanan Pangan Di Indonesia: Kaji Ulang Metode Dewan Ketahanan Pangan-World Food Program (*Determination Of The Dimensions And Indicators Of Food Security In Indonesia: The National Food Security Board-World Food Program Methodology Revisited*)”. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. *Widyariset*, Vol. 15 No.1.
- Rosdiana,H. dkk. “*Meningkatkan ketahan pangan melalui pembangunan agropilitan*”. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2014. “*Metode Penelitian Manajemen*”. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suhardianto, Anang. dkk. 2007. “Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Penghasil Beras Organik (*Household Food Security of Farmers who Yielding Organic Rice*)”. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 2(3): 1 - 12
- Tanjung, B.N and Ardial. 2005. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Prposal, Skripsi, dan Tesis)*”. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wibowo,U.B. 2011. “Teori Kepemimpinan”. BKD Kota Yogyakarta: *Jurnal Teori Kepemimpinan*.

NEWS Rebulika.co.id : Jumat, 05 Desember 2014, 19:43 WIB

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012

Laporan SKPG Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo

Renstra Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo

Renstra Badan Ketahanan Pangan 2015-2019

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016

<http://adaddanuarta.blogspot.co.id/2014/11/gaya-kepemimpinan-merurut-para-ahli.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/43928/4/Chapter%20II.pdf>

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-analisis-data-menurut-ahli.html>

diakses pada tanggal 14 oktober 2016, 06.00 WIB